

Pengaruh Globalisasi, Perkembangan Finansial, dan TIK terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia

The Effects of Globalization, Financial Development, and ICT on Income Inequality in Western and Eastern Indonesia

Marvela Alfarosa Pardede¹, Aisyah Fitri Yuniasih²

¹Politeknik Statistika STIS, 211911021@stis.ac.id;

²Politeknik Statistika STIS, aisyah.fy@stis.ac.id.

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang dialami baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, upaya pemerataan distribusi pendapatan termasuk ke dalam salah satu agenda prioritas nasional maupun regional. Perbedaan kondisi pembangunan di wilayah KBI dan KTI menyebabkan kedua wilayah memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda pula. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis yang mampu menangkap adanya keragaman pada kedua kawasan tersebut. Pada era globalisasi ini, peran keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan penggerak utama perekonomian. Pembangunan finansial yang baik juga memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum serta pengaruh keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial, perkembangan finansial, dan TIK terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di KBI dan KTI tahun 2010-2021. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial meningkatkan ketimpangan di KBI dan KTI, sedangkan perkembangan finansial dan TIK mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di KBI. Sementara itu, perbedaan yang ditemukan di provinsi-provinsi KTI adalah perkembangan finansial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pembangunan sektor TIK serta memberdayakan program penyaluran kredit yang mudah diakses termasuk di wilayah KTI sebagai upaya menurunkan ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: ketimpangan pendapatan, globalisasi, perkembangan finansial, TIK, regresi data panel

Klasifikasi JEL: O11, F63, F14, E22

PENDAHULUAN

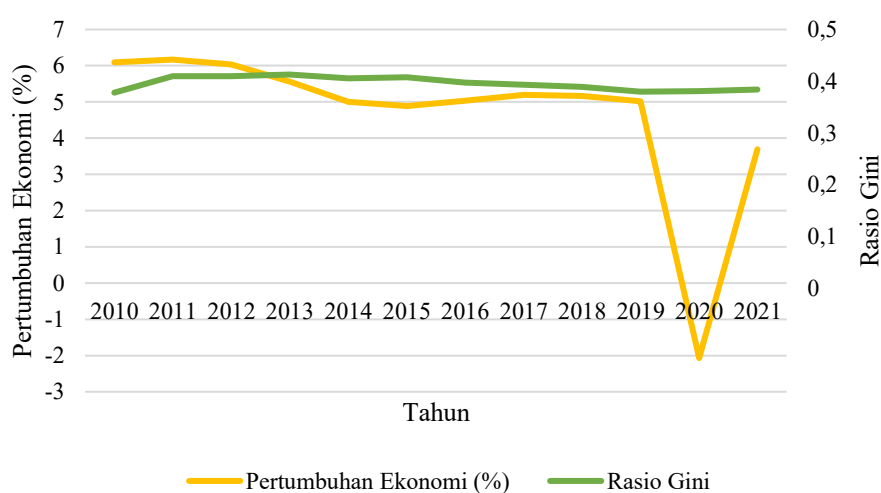
Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan umum yang timbul sebagai dampak dari pembangunan ekonomi suatu negara. Program-program strategis yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah mampu mendorong

percepatan pembangunan ekonomi nasional. Meskipun begitu, pada kenyataannya peningkatan kesejahteraan ini belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Klasen (2010) memaparkan kerangka konseptual untuk pertumbuhan inklusif harus dipahami

secara luas sebagai pertumbuhan yang nondiskriminatif sekaligus mengurangi kerugian termasuk kesenjangan pendapatan. Hal ini berarti proses pembangunan ekonomi bersifat multidimensi, bukan hanya aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010 sampai 2019 cenderung stabil pada kisaran 5-6%. Pada periode yang sama, rasio gini melonjak pada tahun 2011 tetapi

terjadi perbaikan distribusi pendapatan hingga nilainya mencapai 0,38 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kondisi pandemi menyebabkan rasio gini kembali menunjukkan peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih sangat fluktuatif dan rentan terhadap guncangan, misalnya pandemi Covid-19 (Pusparisa, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini di Indonesia Tahun 2010-2021

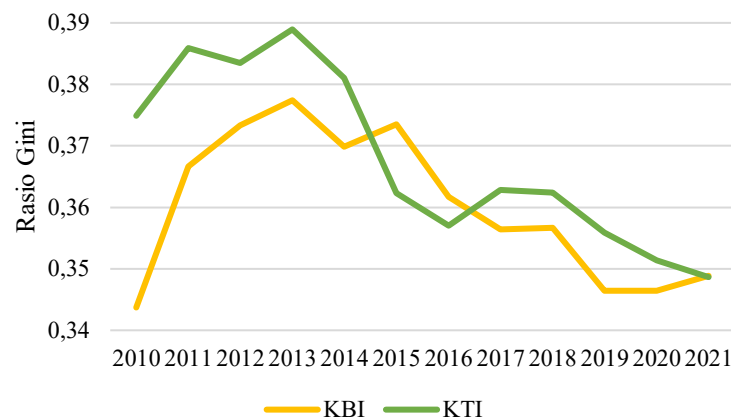
Upaya pemerataan distribusi pendapatan merupakan tantangan global, nasional, juga regional. Penurunan ketimpangan di dalam dan antarnegara merupakan agenda SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tujuan ke-10. Di tingkat nasional, salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024 adalah menyelesaikan isu strategis utama yaitu menurunkan ketimpangan antarwilayah menjadi 0,36 sampai dengan 0,374. Sementara itu, data BPS menunjukkan rasio gini Indonesia pada Maret 2021 sebesar 0,384 yang menunjukkan bahwa target nasional masih belum tercapai. Apabila

ditinjau pada level provinsi, masih terdapat sepuluh provinsi yang memiliki rasio gini di atas target.

Berdasarkan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok wilayah yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang terdiri atas 17 provinsi di Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali serta Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri atas 16 provinsi di luar ketiga pulau tersebut. Kondisi ketimpangan pendapatan pada wilayah KBI dan KTI juga menunjukkan adanya perbedaan. Gambar 2 menunjukkan

perkembangan rata-rata rasio gini di provinsi-provinsi wilayah KBI dan KTI pada tahun 2010 hingga 2021. Secara umum, nilai rasio gini di wilayah KTI lebih tinggi dibandingkan dengan KBI. Pada tahun 2010 sampai 2014, terlihat perbedaan yang cukup jelas antara rasio gini di KTI dan KBI. Seiring bertambahnya waktu, rasio gini di KBI melonjak sehingga perbedaan antara kedua wilayah menjadi semakin kecil. Bahkan pada tahun 2015 dan

2016, rasio gini di KBI lebih tinggi dibandingkan KTI. Berikutnya, ketimpangan pendapatan di KTI kembali memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan KBI. Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di KBI kembali meningkat pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh pendapatan sebagian besar penduduk yang berkurang saat pandemi Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 2. Rasio Gini di KBI dan KTI Tahun 2010-2021

Ketimpangan distribusi pendapatan juga berkaitan dengan aspek-aspek dalam mengukur kualitas hidup seperti akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Semakin tinggi ketimpangan di suatu wilayah, maka infrastruktur dan fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah menjadi semakin terbatas. Apabila masalah ketimpangan tidak ditangani dengan baik, dampaknya akan memicu naiknya angka kemiskinan.

Pada era globalisasi ini, keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial dan pergerakan modal, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan penggerak utama

perekonomian (Asteriou et al., 2014). Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara berusaha meningkatkan daya saing (*competitiveness*) untuk memperoleh keuntungan perdagangan atau *gains from trade* (Todaro & Smith, 2011). Sementara itu, keterbukaan finansial diperlukan untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, membiayai pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung perkembangan sektor keuangan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Purnomo, 2020). Peran sektor TIK juga semakin kuat dan menjadi fasilitator utama dalam berbagai aktivitas. Melalui pembangunan sektor TIK secara merata, diharapkan ketimpangan akan berkurang.

Keterbukaan finansial yang tinggi di suatu wilayah mengindikasikan bahwa pembangunan finansial wilayah tersebut relatif baik. Perkembangan finansial (*financial development*) dapat dijadikan ukuran bagi pertumbuhan sektor keuangan dan instrumen keuangan lainnya yang merupakan faktor penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Levine (2005) memaparkan bahwa perkembangan finansial melibatkan perbaikan dan pembangunan fungsi-fungsi sistem keuangan yang mencakup pengumpulan tabungan, pengalokasian modal ke investasi produktif, pemantauan investasi, pengelolaan risiko, serta pertukaran barang dan jasa.

Hasil penelitian Ningsih dan Choi (2018) memaparkan bahwa keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial meningkatkan ketimpangan pendapatan, sedangkan teknologi dapat mengurangi ketimpangan di negara-negara ASEAN. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Kuntoro et al. (2020) mengemukakan bahwa keterbukaan perdagangan signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan, sedangkan penanaman modal asing (PMA) memperparah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Adapun hasil penelitian Restulillah dan Ariusni (2020) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perkembangan finansial berpengaruh positif signifikan, investasi asing langsung berpengaruh negatif signifikan, dan urbanisasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan data-data tersebut, teridentifikasi beberapa perbedaan dalam menjelaskan hubungan keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial,

perkembangan finansial, dan TIK terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian-penelitian di atas juga belum banyak menganalisis pengaruh perkembangan finansial yang merupakan salah satu bentuk pembangunan sektor keuangan sebagai konsekuensi dari keterbukaan finansial suatu wilayah. Penelitian yang berfokus untuk menganalisis pengaruh globalisasi, perkembangan finansial, dan TIK juga belum tersedia pada tingkat provinsi, khususnya pada wilayah KBI dan KTI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum ketimpangan distribusi pendapatan, keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial, perkembangan finansial, dan TIK provinsi-provinsi di KBI dan KTI serta menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial, perkembangan finansial, dan TIK terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di KBI dan KTI periode 2010 sampai dengan 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat perbedaan tingkat pendapatan antarpenduduk yang berimplikasi pada tingkat penerimaan antarpenduduk yang tidak sama (Todaro & Smith, 2011). Ukuran ketimpangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah rasio gini. Todaro & Smith (2011) mendefinisikan rasio gini sebagai ukuran dari ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 (kemeraan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Semakin besar nilai rasio gini suatu wilayah, maka semakin timpang distribusi pendapatannya. Rumus penghitungan rasio gini dapat ditunjukkan pada Persamaan 1.

$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n f_i [Y_i + Y_{i-1}] \quad (1)$$

Keterangan:

f_i : Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i

Y_i : Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i

Y_{i-1} : Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- $(i-1)$

Keterbukaan Perdagangan dan Ketimpangan Pendapatan

Badan Pusat Statistik mengukur keterbukaan perdagangan dengan menjumlahkan ekspor dan impor dibagi dengan PDB di wilayah tersebut. Semakin besar derajat keterbukaan, maka dapat dikatakan perekonomian suatu wilayah semakin terbuka. Boediono (2014) mengemukakan bahwa keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan ketimpangan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan. Myrdal dalam Jhingan (2012) juga berpendapat bahwa secara tidak langsung perdagangan antarnegara meningkatkan ketimpangan. Adanya perdagangan ini hanya akan menguntungkan bagi salah satu sisi, yaitu wilayah yang sudah maju. Di sisi lain, perdagangan internasional juga berpotensi mendistribusikan pendapatan secara merata (Krugman & Obsfeld, 2004).

Keterbukaan Finansial dan Ketimpangan Pendapatan

Zhang et al. (2015) mengukur keterbukaan finansial secara *de facto* menggunakan rasio dari investasi asing langsung terhadap PDB-nya. Teori Hecksher-Ohlin yang termasuk pada teori perdagangan neoklasik mengasumsikan negara berkembang memiliki faktor produksi tenaga kerja yang melimpah, sedangkan negara maju lebih unggul dalam hal kepemilikan faktor produksi modal. Aliran PMA yang berasal dari negara maju ke negara berkembang akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja sehingga pada tahap tertentu akan terjadi pemerataan tingkah upah. Sementara itu, teori ketergantungan (*dependency theory*) menyatakan argumen yang

berlawanan dengan pandangan neoklasik. Dalam teori ini, investasi asing langsung dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga memicu munculnya ketimpangan pendapatan.

Perkembangan Finansial dan Ketimpangan Pendapatan

Dimensi yang umum digunakan untuk mengukur perkembangan finansial adalah dimensi kedalaman yang diproksikan dengan rasio kredit sektor privat terhadap PDB di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pasar keuangan yang berkembang membutuhkan pembiayaan melalui kredit swasta, sedangkan keuntungan dari peningkatan produksi juga akan meningkatkan simpanan dan tabungan di lembaga keuangan yang kemudian kembali disalurkan menjadi lebih banyak kredit dalam perekonomian (Jauch & Watzka, 2016). Banerjee dan Newman (1993) serta Galor dan Zeira (1993) mengemukakan bahwa adanya perkembangan finansial mampu mereduksi ketimpangan pendapatan, sedangkan Greenwood & Jovanovic (1990) berpendapat bahwa hubungan antara perkembangan finansial dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva “U-terbalik”. Pada tahapan awal perkembangan sektor keuangan akan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, setelah perkembangan keuangan dan ekonomi mencapai tahap tertentu, sektor keuangan yang semakin berkembang akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Ketimpangan Pendapatan

TIK adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah dalam menghasilkan suatu informasi yang cepat, lengkap, akurat, transparan, dan mutakhir (Munir, 2009). Perkembangan TIK yang cukup pesat di Indonesia berdampak pada terjadinya perubahan dan kemajuan yang signifikan, termasuk aksesibilitas internet. Salah satu indikator pengukuran TIK yang dikumpulkan oleh BPS adalah akses dan penggunaan internet. Persentase penduduk yang mengakses internet dapat dijadikan suatu ukuran kondisi TIK. Fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan bahwa semakin tinggi produktivitas teknologi maka *output* yang dihasilkan akan semakin meningkat walaupun kuantitas faktor produksi yang digunakan sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* dan publikasi Badan Pusat Statistik, publikasi Statistik Kementerian Perdagangan, dan publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dari Bank Indonesia. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri atas 17 provinsi di KBI dan 16 provinsi di KTI sebagai unit individu atau *cross-section* serta data *time series* dengan satuan tahunan periode tahun 2010-2021. Dengan demikian, jumlah observasi data adalah sebanyak 204 observasi untuk wilayah KBI dan 192 observasi untuk wilayah KTI. Pada penelitian ini, Provinsi Kalimantan Utara diagregasi dengan Provinsi Kalimantan Timur karena data Provinsi Kalimantan Utara tidak tersedia

secara lengkap pada periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya grafik batang sebagai alat yang dapat memberikan gambaran awal mengenai variabel maupun hubungan antarvariabel pada model serta metode regresi data panel untuk menangkap adanya efek individu dari tiap provinsi. Menurut Baltagi (2005), salah satu keuntungan menggunakan regresi data panel adalah mampu menangkap heterogenitas tiap unit individu. Baltagi (2005) merumuskan bentuk umum regresi data panel untuk K variabel independen yang ditunjukkan pada Persamaan (2).

$$equaly_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + u_{it} \quad (i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T) \quad (2)$$

dengan

$$u_{it} = \mu_i + v_{it} \quad (3)$$

Dalam membentuk model regresi data panel, terdapat tiga alternatif model regresi yang mungkin terbentuk yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditransformasi agar memenuhi asumsi normalitas dan memiliki

varians koefisien regresi yang lebih kecil. Transformasi yang dilakukan menggunakan logaritma natural pada seluruh variabel dalam penelitian ini. Spesifikasi model umum yang pada wilayah KBI dan KTI ditunjukkan pada Persamaan (4) dan (5).

Model KBI:

$$\ln GINI_{KBI_{it}} = \alpha + \beta_1 \ln TO_{KBI_{it}} + \beta_2 \ln FO_{KBI_{it}} + \beta_3 \ln KREDIT_{KBI_{it}} + \beta_4 \ln TIK_{KBI_{it}} + u_{it} \quad (4)$$

Model KTI:

$$\ln GINI_{KTI_{it}} = \alpha + \beta_1 \ln TO_{KTI_{it}} + \beta_2 \ln FO_{KTI_{it}} + \beta_3 \ln KREDIT_{KTI_{it}} + \beta_4 \ln TIK_{KTI_{it}} + u_{it} \quad (5)$$

Untuk memilih model yang terbaik, dilakukan tiga macam pengujian yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (uji BP-LM).

Jika pemilihan model regresi memberikan hasil bahwa model terbaik adalah FEM, perlu dilakukan pengujian terhadap struktur

varians-kovarians residual melalui uji LM dan uji λ_{LM} . Apabila model yang terpilih adalah model CEM atau REM, pengujian terhadap struktur varians-kovarians residual tidak perlu dilakukan. Kemudian, lakukan pengujian asumsi klasik. Apabila metode estimasi yang terpilih adalah OLS maka asumsi normalitas, homoskedastisitas, nonautokorelasi, dan nonmultikolinieritas harus terpenuhi. Namun, apabila metode estimasi yang terpilih adalah WLS, FGLS-SUR, atau GLS maka hanya diperlukan pengujian asumsi normalitas dan pemeriksaan nonmultikolinieritas. Apabila terdapat asumsi yang tidak terpenuhi maka lakukan transformasi data dan kembali ke tahap awal pada pemilihan model regresi. Selanjutnya, dilakukan pengujian keberartian parameter baik secara simultan melalui uji F maupun secara parsial melalui uji t. Tahapan terakhir dalam metode regresi data panel adalah interpretasi hasil dari model yang diperoleh.

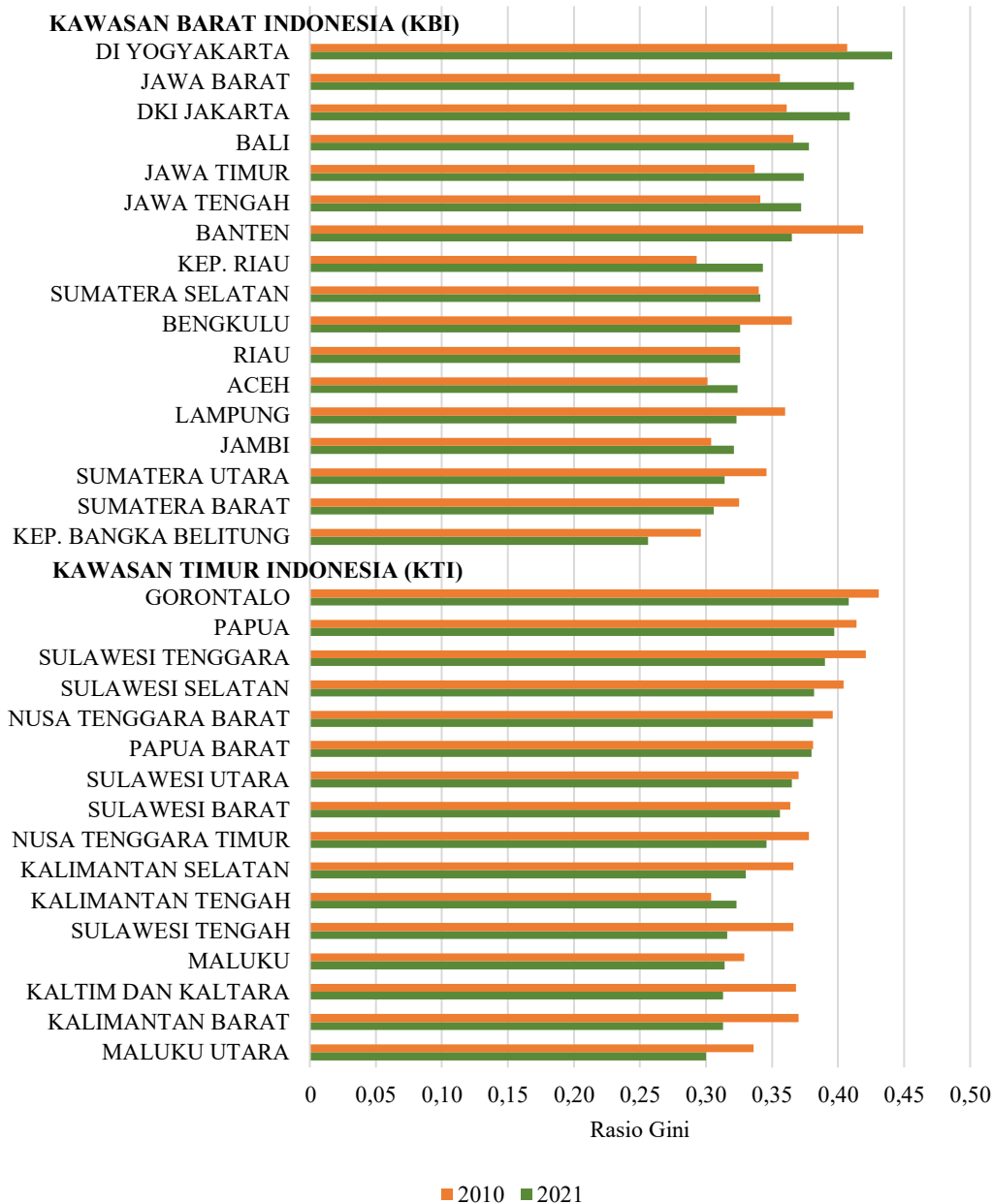
Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis penelitian yang diajukan di antaranya minimal salah satu variabel independen yaitu keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial, perkembangan finansial, dan TIK memengaruhi ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di KBI dan KTI tahun 2010-2021 serta keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial, perkembangan finansial, dan TIK secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di KBI dan KTI tahun 2010-2021.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Rasio Gini, Keterbukaan Perdagangan, Keterbukaan Finansial, Perkembangan Finansial, dan TIK

Rasio Gini

Provinsi D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki rasio gini paling tinggi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,441 (Gambar 3). Tingkat ketimpangan yang terlampau tinggi di D.I Yogyakarta merupakan dampak dari pesatnya pembangunan yang dilakukan di D.I Yogyakarta tetapi tidak menyasar kepada kelompok menengah ke bawah. Akibatnya, manfaat ekonomi dari hasil pembangunan tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas dan ketimpangan pendapatan menjadi semakin lebar. Berdasarkan Gambar 3 tersebut, Provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta yang merupakan tiga provinsi dengan rasio gini tertinggi di tahun 2021 mengalami kenaikan rasio gini dibandingkan tahun 2010. Pergerakan rasio gini di setiap provinsi berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sementara itu, rasio gini terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 0,256. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung konsisten menduduki posisi provinsi dengan rasio gini terendah selama periode 2010 sampai 2021 kecuali pada tahun 2015. Perubahan rasio gini terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil menurunkan rasio gini sebesar 0,057, sedangkan Provinsi Jawa Barat justru mengalami kenaikan rasio gini sebesar 0,056 pada akhir periode penelitian dibandingkan kondisi awal periode.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 3. Rasio Gini Provinsi-Provinsi di KBI dan KTI Tahun 2010 dan 2021

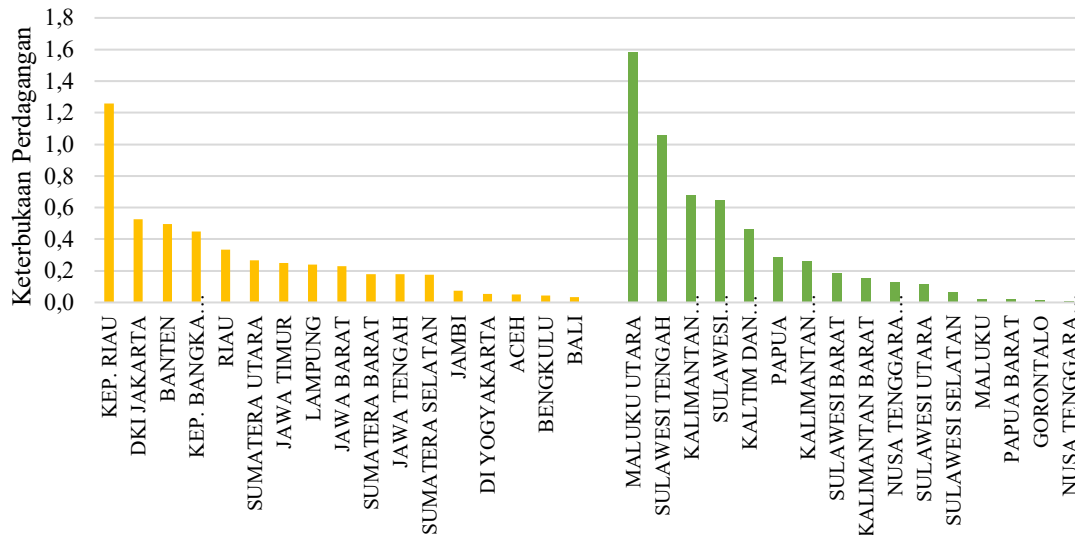
Keterbukaan Perdagangan

Kondisi keterbukaan perdagangan provinsi-provinsi di Indonesia sangat bervariasi (Gambar 4). Pada tahun 2021, provinsi yang memiliki keterbukaan perdagangan tertinggi di KTI adalah Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 1,58. Nilai realisasi ekspor nonmigas di provinsi tersebut sebesar 58.413.005,3 juta rupiah, sedangkan pada nilai realisasi impor pada

periode yang sama adalah sebesar 24.368.598,2 juta rupiah. Adapun Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat kedua menurut rasio keterbukaan perdagangan di Indonesia sekaligus merupakan provinsi yang memiliki keterbukaan perdagangan tertinggi di KBI. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) yang menerapkan kebijakan

penghapusan atas bea dan cukai, halangan nontarif, serta pajak yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan internasional di wilayah tersebut.

Sementara itu, selisih perdagangan paling rendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,0086.



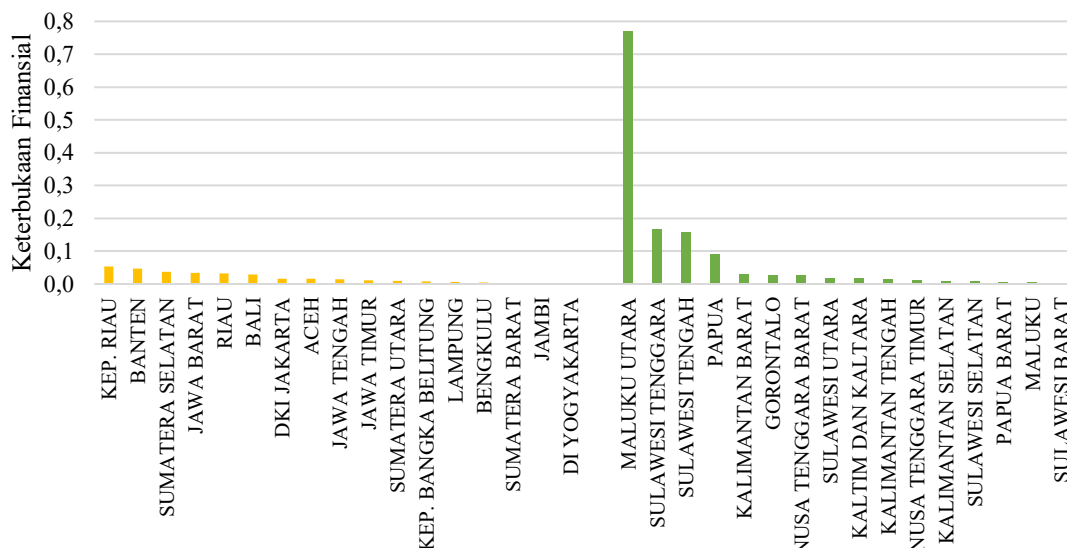
Sumber: Kemendag RI

Gambar 4. Keterbukaan Perdagangan Provinsi-Provinsi di KBI dan KTI Tahun 2021

Keterbukaan Finansial

Sama seperti keterbukaan perdagangan, Provinsi Maluku Utara memiliki keterbukaan finansial yang paling tinggi yaitu sebesar 0,77. Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih memiliki keterbukaan finansial yang rendah. Hanya terdapat lima

provinsi yang mencapai keterbukaan finansial lebih tinggi dari 5 persen, yaitu Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kepulauan Riau. Adapun provinsi yang memiliki keterbukaan finansial terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 0,0017.



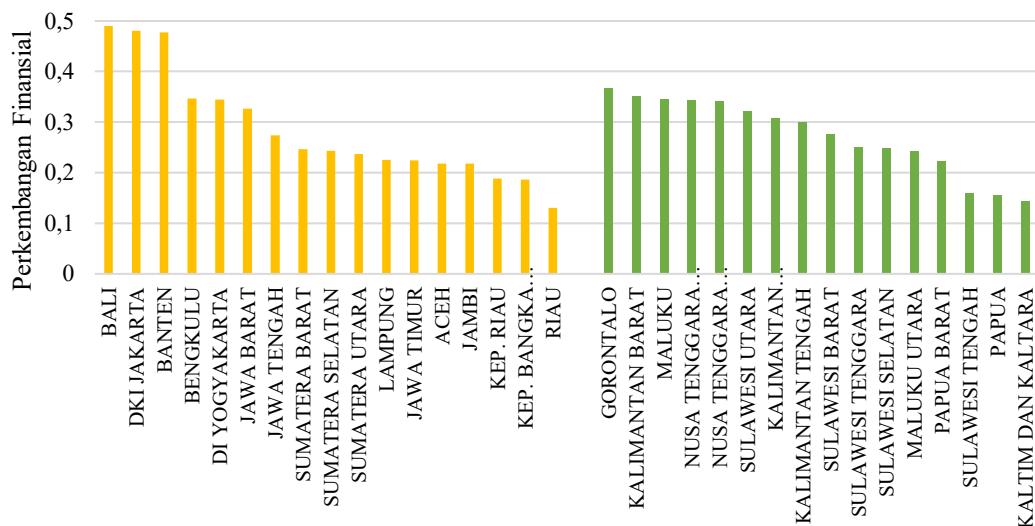
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 5. Keterbukaan Finansial Provinsi-Provinsi di KBI dan KTI Tahun 2021

Perkembangan Finansial

Kondisi perkembangan finansial antarprovinsi di Indonesia cukup bervariasi. Gambar 6 menunjukkan rasio kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan di setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan perkembangan finansial paling tinggi yaitu sebesar 0,49. Pada tahun 2021, realisasi kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah

sebesar 107.664 miliar rupiah. Nilai tersebut hampir mencapai setengah dari PDRB ADHB Provinsi Bali tahun 2021. Tingginya penyaluran kredit turut berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian di Provinsi Bali khususnya pasca pandemi Covid-19. Sementara itu, provinsi yang memiliki perkembangan finansial terendah adalah Provinsi Riau yaitu sebesar 0,13.



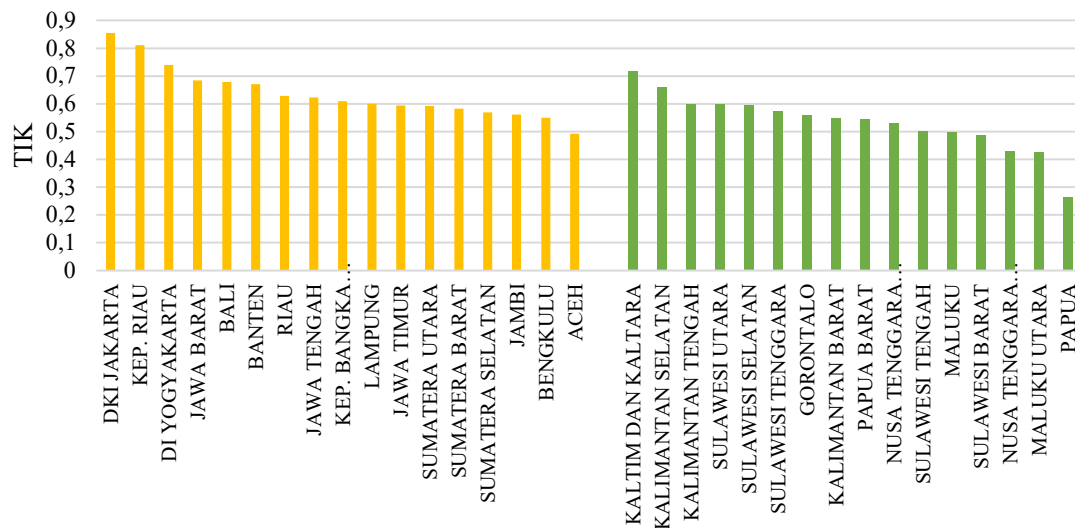
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 6. Perkembangan Finansial Provinsi-Provinsi di KBI dan KTI Tahun 2021

TIK

Gambar 7 menunjukkan kondisi TIK provinsi-provinsi di Indonesia yang mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan teknologi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Apabila ditinjau menurut provinsi, pada tahun 2021 TIK di Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,85. Tingginya jumlah pengguna internet tersebut tidak terlepas dari keberadaan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota negara serta pusat pemerintahan yang

memiliki akses dan infrastruktur teknologi paling memadai dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Provinsi yang berada di KBI memiliki TIK yang cenderung lebih tinggi daripada provinsi-provinsi di KTI. Adapun provinsi dengan TIK terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan pembangunan TIK di Provinsi Papua masih relatif lambat dan kesenjangan digital di Indonesia masih terjadi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 7. TIK Provinsi-Provinsi di KBI dan KTI Tahun 2021

Analisis Regresi Data Panel

Untuk memilih model terbaik pada regresi data panel, dilakukan tiga macam pengujian yaitu uji *Chow* untuk membandingkan model CEM dan FEM, uji *Hausman* untuk membandingkan model FEM dan REM, serta uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (Uji BP-LM) untuk

membandingkan model CEM dan REM. Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan uji *Chow* dan uji *Hausman* diperoleh kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah model FEM. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dengan pengujian struktur varians-kovarians residual.

Tabel 1. Ringkasan Pemilihan Model Terbaik

No	Pengujian	Wilayah		Kesimpulan
		KBI	KTI	
1	Uji Chow	p-value = <0,001*	p-value = <0,001*	Model FEM lebih sesuai
2	Uji Hausman	p-value = <0,001*	p-value = 0,0259*	Model FEM lebih sesuai

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: * = signifikan pada taraf uji 5%

Untuk memilih metode estimasi yang paling sesuai, digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang bertujuan melihat apakah residual bersifat homoskedastis atau heteroskedastis serta uji λ_{LM} yang bertujuan melihat apakah terdapat *cross-sectional*

correlation. Berdasarkan Tabel 2, struktur varians-kovarians residual bersifat heteroskedastis dan terdapat *cross-sectional correlation* sehingga metode estimasi parameter yang digunakan adalah FGLS-SUR.

Tabel 2. Ringkasan Pengujian Struktur Varians-Kovarians Residual

No	Pengujian	Wilayah		Kesimpulan
		KBI	KTI	
1	Uji LM	Statistik Hitung = 101,00	Statistik Hitung = 95,00	Terjadi heteroskedastisitas
2	Uji λ_{LM}	Statistik Hitung = 287,34	Statistik Hitung = 220,25	Terjadi <i>cross-sectional correlation</i>

Sumber: BPS, diolah

Pada penelitian ini, metode estimasi yang paling sesuai adalah FGLS-SUR sehingga terdapat dua macam uji asumsi klasik yang perlu dilakukan, yaitu uji normalitas dan

pemeriksaan nonmultikolinieritas. Tabel 3 menunjukkan bahwa model pada wilayah KBI dan KTI memenuhi asumsi normalitas dan multikolinieritas.

Tabel 3. Ringkasan Pengujian dan Pemeriksaan Asumsi Klasik

No	Pengujian	Wilayah		Kesimpulan
		KBI	KTI	
1	Normalitas	Jarque-Bera	p-value = 0,1137	p-value = 0,3441
2	Non-multikolinieritas	VIF	Nilai VIF semua variabel bebas < 10	Nilai VIF semua variabel bebas < 10

Sumber: BPS, diolah

Persamaan regresi data panel yang dapat menunjukkan pengaruh keempat variabel independen terhadap ketimpangan (7).

Model KBI:

$$\begin{aligned} \widehat{LnGINI}_{KBI_{it}} = & (-1,0117 + \hat{\mu}_t) + 0,0171LnTO^*_{KBI_{it}} + 0,0163LnFO^*_{KBI_{it}} \\ & - 0,0120LnKREDIT^*_{KBI_{it}} - 0,0582LnTIK^*_{KBI_{it}} \end{aligned} \quad (6)$$

Model KTI:

$$\begin{aligned} \widehat{LnGINI}_{KTI_{it}} = & (-1,0360 + \hat{\mu}_t) + 0,0075LnTO^*_{KTI_{it}} + 0,0067LnFO^*_{KTI_{it}} \\ & - 0,0009LnKREDIT^*_{KTI_{it}} - 0,0476LnTIK^*_{KTI_{it}} \end{aligned} \quad (7)$$

* = signifikansi pada taraf 5 persen

Keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap rasio gini di KBI. Setiap peningkatan derajat keterbukaan perdagangan sebesar 1 persen maka rasio gini di KBI akan meningkat sebesar 0,0171 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Sejalan dengan model KBI, keterbukaan perdagangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di KTI. Ketika keterbukaan perdagangan meningkat sebesar 1 persen maka rasio gini di KTI akan meningkat sebesar 0,0075 persen dengan asumsi variabel lain konstan.

Kondisi ketimpangan ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antarpihak yang terlibat dalam perdagangan sehingga pihak yang lebih kuat dapat mengambil keuntungan yang lebih banyak dari keterbukaan perdagangan. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan yang dapat memberdayakan dan melindungi pelaku usaha kecil sangat dibutuhkan agar penduduk berpenghasilan rendah dapat memperoleh keuntungan dari adanya perdagangan internasional (Agusalim & Pohan, 2018). Selain itu, provinsi-provinsi dengan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya seperti Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Tengah cenderung memiliki rasio gini yang tinggi karena hasil impor hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas sehingga adanya keterbukaan perdagangan justru memperparah ketimpangan pendapatan.

Keterbukaan finansial berpengaruh signifikan dan positif terhadap rasio gini di KBI. Setiap peningkatan derajat keterbukaan finansial sebesar 1 persen maka rasio gini di KBI akan meningkat sebesar 0,0163 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Kondisi tersebut

dapat terjadi karena penduduk dengan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih mudah untuk memanfaatkan investasi asing dan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut sehingga memperparah ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, efek dari penanaman modal asing (PMA) belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia (Kuncoro & Murbarani, 2016).

Pada model KTI, ketika keterbukaan finansial meningkat sebesar 1 persen maka rasio gini di KTI akan meningkat sebesar 0,0067 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dalam memilih wilayah untuk menanamkan modalnya, investor asing mempertimbangkan karakteristik wilayah seperti kondisi infrastruktur, struktur dan kebijakan ekonomi, serta sistem hukum di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi di wilayah KTI umumnya memiliki kondisi infrastruktur yang lebih terbatas dibandingkan wilayah KBI sehingga aliran PMA di wilayah KTI cenderung masih rendah dan hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu.

Perkembangan finansial yang diprosikan dengan pinjaman kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dibagi PDRB atas dasar harga berlaku berpengaruh signifikan dan negatif terhadap rasio gini di KBI. Setiap peningkatan pinjaman kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan sebesar 1 persen maka rasio gini di KBI akan menurun sebesar 0,012 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Perkembangan finansial dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena pengalokasian kredit khususnya kepada penduduk berpendapatan rendah dapat digunakan untuk ekspansi usaha,

peningkatan *output*, dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kenaikan pendapatan sekaligus penurunan ketimpangan pendapatan.

Sejalan dengan hasil tersebut, Kappel (2010) serta Putra dan Lisna (2020) juga menyimpulkan bahwa penyaluran kredit dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan produktif seperti investasi, pendidikan, dan modal usaha sehingga dapat mengatasi ketimpangan pendapatan. Penyaluran kredit yang merata dan tepat sasaran pada sektor-sektor produktif dapat meningkatkan produktivitas dan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat di KBI dan KTI.

Sementara itu, variabel perkembangan finansial tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di KTI. Jumlah kredit yang disalurkan di KBI lebih tinggi dibandingkan KTI. Dalam rentang tahun 2010 sampai tahun 2021, rata-rata kredit yang diberikan per tahun di wilayah KBI sebesar 7.458.894 miliar rupiah atau enam kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata kredit di wilayah KTI yang hanya sebesar 1.235.244 miliar rupiah. Restulillah dan Ariusni (2020) berpendapat bahwa perkembangan finansial masih terkonsentrasi di KBI sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah KTI. Masyarakat yang lebih mampu atau lebih dekat dengan pusat ekonomi dan bisnis cenderung lebih mudah mendapatkan akses terhadap kredit, layanan perbankan, dan lembaga keuangan formal dibandingkan masyarakat yang lebih jauh dari pusat perekonomian.

Variabel TIK yang menggunakan proksi rasio pengguna internet terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap rasio gini di KBI. Setiap peningkatan rasio pengguna internet sebesar 1 persen maka rasio gini di KBI akan menurun sebesar 0,0582 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Adapun variabel TIK juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan KTI. Ketika rasio pengguna internet naik sebesar 1 persen, maka rasio gini di KTI akan menurun sebesar 0,0476 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Internet memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi baru, meningkatkan akses ke pasar, mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas, dan memperoleh berbagai sumber daya secara lebih efisien sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur TIK yang merata di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, rasio gini di KBI meningkat sejak tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Secara umum, nilai rasio gini di wilayah KTI lebih tinggi dibandingkan dengan KBI. Apabila ditinjau pada tingkat provinsi, pada tahun 2021 Provinsi DI Yogyakarta memiliki rasio gini tertinggi sedangkan rasio gini terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung. Keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial bersifat fluktuatif selama periode penelitian. Rasio kredit di kedua wilayah mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga 2012 tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan yang tajam sehingga rasio kredit

cenderung konstan. Perkembangan TIK memiliki tren yang positif. Pada tahun 2021, keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial di KTI lebih tinggi dibandingkan rasio di KBI. Sementara itu, perkembangan finansial dan TIK di KBI lebih tinggi dibandingkan di KTI. Kedua, Keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial meningkatkan ketimpangan pendapatan di KBI dan KTI, sedangkan perkembangan finansial dan TIK mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di KBI. Sementara itu, ditemukan bahwa perkembangan finansial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi KTI.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong ekspor seperti peningkatan akses pasar, simplifikasi prosedural, dan subsidi ekspor demi menciptakan iklim perdagangan yang kondusif khususnya pada provinsi-provinsi dengan nilai impor yang lebih tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Tengah. Aliran penanaman modal asing (PMA) yang masuk difokuskan pada sektor-sektor ekonomi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga peningkatan PMA dapat mengurangi selisih distribusi pendapatan antarpenduduk. Optimalisasi program-program penyaluran kredit bunga rendah yang tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah agar mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, khususnya di provinsi-provinsi dengan perkembangan finansial yang masih rendah. Pembangunan sektor TIK melalui peningkatan utilisasi Palapa Ring Timur di wilayah KTI perlu dijadikan prioritas pemerintah sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengukuran variabel perkembangan finansial dan TIK dapat menambahkan dimensi lain untuk memperkaya analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., & Pohan, F. S. (2018). Trade openness effect on income inequality: Empirical evidence from Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1–14.
- Asteriou, D., Dimelis, S., & Moudatsou, A. (2014). Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries. *Economic Modelling*, 36, 592–599.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed). John Wiley & Sons Ltd.
- Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational Choice and the Process of Development. *Journal of Political Economy*, 101(2), 274–298.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. *The Review of Economic Studies*, 60(1), 35–52.
- Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 1), 1076–1107.
- Jauch, S., & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: a panel data approach. *Empirical Economics*, 51, 291–314.

- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. *CER-ETH-Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper*, 10/127.
- Klasen, S. (2010). *Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals*.
- Krugman, P. R., & Obsfeld, M. (2004). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan* (Edisi Kelima). Jakarta: Penerbit Indeks.
- Kuncoro, M., & Murbarani, N. (2016). Regional inequality in Indonesia, 1994-2012. *The Business & Management Review*, 8(1), 38.
- Kuntoro, E., Anggraeni, L., & Widyastutik, W. (2020). *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi dan Transformasi Struktural terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*.
- Levine, R. (2005). Chapter 12 Finance and Growth: Theory and Evidence. In *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1, Issue SUPPL. PART A, pp. 865–934). [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01012-9](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01012-9)
- Munir, M. (2009). Kontribusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan di era globalisasi pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2(2), 1–4.
- Ningsih, C., & Choi, Y.-J. (2018). *An effect of internet penetration on income inequality in Southeast Asian countries*.
- Purnomo, R. N. (2020). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007–2017). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 20–35.
- Pusparisa, Y. (2021). *Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi*. <https://katadata.co.id/muhammadrdrdhoi/analisisdata/600ae1cc246d2/ketimpangan-ekonomi-indonesia-ada-di-berbagai-sisi>
- Putra, R. F. I., & Lisna, V. (2020). Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan (PGI TRIANGLE): Pembangunan Keuangan, Pembangunan Manusia, dan Ketimpangan Pendapatan Di Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 77–89.
- Restulillah, F. H., & Ariusni, A. (2020). Pengaruh Financial Development, Investasi Asing Langsung dan Urbanisasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 55–58.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kesebelas.). Penerbit Erlangga.
- Zhang, C., Zhu, Y., & Lu, Z. (2015). Trade openness, financial openness, and financial development in China. *Journal of International Money and Finance*, 59, 287–309.